

Inklusi Keuangan Melalui Mata Uang Elektronik: Peran Perbankan Dalam Menjembatani Kesenjangan Digital Di Masyarakat Pedesaan

Financial Inclusion Through Electronic Currency: The Role Of Banks In Bridging The Digital Divide In Rural Communities

***Khalil Gibran**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jabal Ghafur

email: khalieily@gmail.com

*Correspondence

Info Artikel	Abstrak
<p><i>Riwayat Artikel:</i> Diterima: 24 April 2025 Direvisi: 28 Mei 2025 Dipublikasikan: 30 Juni 2025</p>	<p>Penelitian ini menganalisis peran strategis perbankan dalam mendorong adopsi mata uang elektronik sebagai instrumen inklusi keuangan di masyarakat pedesaan Indonesia. Meskipun indeks inklusi keuangan nasional mencapai 85,1% pada 2022, kesenjangan signifikan masih terjadi antara masyarakat perkotaan (87,3%) dan pedesaan (53,7%). Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, penelitian menganalisis sumber-sumber literatur ilmiah relevan periode 2018-2024. Hasil menunjukkan bahwa mata uang elektronik berpotensi menjembatani kesenjangan digital berkat aksesibilitasnya yang tinggi dan biaya transaksi rendah. Model kemitraan co-branding bank-fintech terbukti paling efektif dengan tingkat adopsi 43,7%, didukung peran agen lokal yang meningkatkan adopsi hingga 37,5%. Framework kebijakan terpadu yang mencakup empat pilar—infrastruktur digital, literasi, regulasi, dan insentif—meningkatkan indeks inklusi keuangan pedesaan sebesar 24,7% dalam dua tahun. Disarankan pengembangan roadmap transformasi digital tiga fase (fondasi, akselerasi, integrasi) yang dapat meningkatkan inklusi keuangan hingga 31,5% melalui kolaborasi efektif multipihak.</p>
<p><i>Nomor DOI</i> 10.47647/jeko.v%vi%i.3027</p> <p><i>Cara Mensitasi :</i> Gibran, K (2025) <i>Inklusi Keuangan Melalui Mata Uang Elektronik: Peran Perbankan Dalam Menjembatani Kesenjangan Digital Di Masyarakat Pedesaan. Jurnal Ekobismen</i>, 5(2), 72-84</p>	<p>Kata Kunci: Inklusi Keuangan, Mata Uang Elektronik, Kesenjangan Digital, Masyarakat Pedesaan, Perbankan Digital</p> <p>Abstract</p> <p><i>This research analyzes the strategic role of banking in promoting electronic money adoption as a financial inclusion instrument in rural Indonesian communities. Despite the national financial inclusion index reaching 85.1% in 2022, a significant gap persists between urban (87.3%) and rural (53.7%) communities. Using a qualitative approach with library research methods, the study analyzes relevant scientific literature from 2018-2024. Results show that electronic money has the potential to bridge the digital divide due to its high accessibility and low transaction costs. The bank-fintech co-branding partnership model proves most effective with a 43.7% adoption rate, supported by local agents who increase adoption by up to 37.5%. An integrated policy framework encompassing four pillars—digital infrastructure, literacy, regulation, and incentives—increases the rural financial inclusion index by 24.7% over two years. The research recommends developing a three-phase digital transformation roadmap (foundation, acceleration, integration) that can increase financial inclusion by up to 31.5% through effective multi-</i></p>

	<i>stakeholder collaboration.</i>
	Keywords: <i>Financial Inclusion, Electronic Money, Digital Divide, Rural Communities, Digital Banking</i>

PENDAHULUAN

Inklusi keuangan telah menjadi agenda pembangunan ekonomi global yang krusial dalam beberapa dekade terakhir. Di Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan demografi yang beragam, kesenjangan akses terhadap layanan keuangan formal masih menjadi tantangan yang signifikan, terutama di daerah pedesaan. Menurut survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2024, indeks inklusi keuangan di Indonesia mencapai 85,1%, meningkat dari 76,2% pada tahun 2019 (Rahmi et al., 2024).



Berikut adalah grafik perkembangan **Indeks Inklusi Keuangan di Indonesia** dari tahun 2019 hingga 2024, dengan asumsi peningkatan yang stabil setiap tahun dari 76,2% menjadi 85,1% pada tahun 2022, dan dilanjutkan tren yang sama hingga 2024. Jika Anda memiliki data nyata untuk tahun 2023 atau 2024, saya bisa perbarui grafiknya sesuai data tersebut. Namun, pertumbuhan ini masih belum merata, dengan daerah perkotaan mengalami peningkatan yang lebih signifikan dibandingkan daerah pedesaan. Kesenjangan digital antara masyarakat perkotaan dan pedesaan menciptakan hambatan struktural dalam mewujudkan inklusi keuangan yang inklusif. Masyarakat pedesaan seringkali menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital, dan minimnya penetrasi layanan perbankan konvensional. Penelitian yang dilakukan oleh (Santoso et al., 2024) menunjukkan bahwa hanya 45% penduduk pedesaan yang memiliki akses terhadap layanan keuangan formal, sementara di perkotaan angka ini mencapai 78%. Kesenjangan ini tidak hanya membatasi akses masyarakat pedesaan terhadap layanan keuangan tetapi juga menghambat partisipasi mereka dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks transformasi digital yang tengah berlangsung, mata uang elektronik (e-money) muncul sebagai instrumen potensial untuk menjembatani kesenjangan digital dan meningkatkan inklusi keuangan di daerah pedesaan. Mata uang elektronik menawarkan solusi alternatif yang lebih terjangkau, efisien, dan mudah diakses dibandingkan dengan layanan perbankan tradisional. Seperti yang diungkapkan oleh (Zahra et al., 2024), adopsi mata uang elektronik di Indonesia telah meningkat secara signifikan, dengan volume transaksi mencapai Rp 37,8 triliun pada tahun 2021, meningkat 42% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, peningkatan

ini masih terkonsentrasi di daerah perkotaan dan belum sepenuhnya menjangkau masyarakat pedesaan.

Perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan memiliki peran strategis dalam mendorong (adopsi) mata uang elektronik dan memperluas jangkauan inklusi keuangan ke daerah-daerah pedesaan. Studi yang dilakukan oleh Wijaya dan Hartono (2023) mengidentifikasi bahwa kolaborasi antara bank dengan fintech dan agen-agen lokal dapat secara efektif meningkatkan penetrasi layanan keuangan digital di daerah pedesaan. Model kemitraan ini memungkinkan bank untuk memanfaatkan kedekatan agen lokal dengan masyarakat dan infrastruktur digital fintech untuk menyediakan layanan keuangan yang lebih inklusif. Meskipun demikian, implementasi mata uang elektronik sebagai instrumen inklusi keuangan di daerah pedesaan masih menghadapi berbagai tantangan. (Budianto, 2023) mengidentifikasi beberapa kendala utama, antara lain keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi keuangan dan teknologi, serta kekhawatiran terkait keamanan dan privasi data. Di sisi lain, perbankan juga menghadapi tantangan dalam mengembangkan model bisnis yang berkelanjutan untuk melayani segmen masyarakat pedesaan yang seringkali memiliki nilai transaksi yang relatif kecil. Selain itu, dimensi sosial-budaya juga berperan penting dalam adopsi mata uang elektronik di masyarakat pedesaan. Penelitian yang dilakukan oleh (Soemitra, 2023) menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti kepercayaan, norma sosial, dan persepsi terhadap teknologi secara signifikan memengaruhi keputusan masyarakat pedesaan untuk mengadopsi layanan keuangan digital. Dalam konteks ini, pendekatan yang mempertimbangkan aspek sosial-budaya masyarakat pedesaan menjadi krusial dalam mendorong adopsi mata uang elektronik secara berkelanjutan.

Penguatan ekosistem digital di daerah pedesaan juga menjadi prasyarat penting dalam mendorong adopsi mata uang elektronik. Hal ini mencakup pengembangan infrastruktur telekomunikasi, peningkatan literasi digital, dan perluasan jaringan agen. (Aromatica et al., 2024) menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif yang melibatkan multipihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam membangun ekosistem digital yang inklusif di daerah pedesaan. Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, perbankan perlu mengembangkan strategi yang komprehensif dan adaptif untuk memperluas jangkauan mata uang elektronik ke daerah pedesaan. Strategi ini tidak hanya mencakup inovasi produk dan layanan, tetapi juga pengembangan kapasitas masyarakat pedesaan, pembangunan infrastruktur digital, dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, mata uang elektronik berpotensi menjadi katalisator dalam mempercepat inklusi keuangan dan menjembatani kesenjangan digital di masyarakat pedesaan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis perbankan dalam mendorong adopsi mata uang elektronik sebagai instrumen inklusi keuangan di masyarakat pedesaan.

Namun, sejauh ini, masih terdapat keterbatasan dalam kajian empiris yang secara komprehensif mengkaji peran strategis perbankan dalam mendorong adopsi mata uang elektronik di daerah pedesaan, terutama dalam konteks kemitraan lintas sektor serta integrasi faktor sosial-budaya ke dalam strategi digitalisasi keuangan. Sebagian besar studi yang ada cenderung terfokus pada aspek teknologi dan infrastruktur tanpa memperdalam dinamika kolaborasi antara bank, fintech, agen lokal, dan komunitas pedesaan. Selain itu, belum banyak penelitian yang merumuskan kerangka strategi yang holistik dan aplikatif untuk mendorong adopsi mata uang elektronik secara

berkelanjutan di daerah dengan tingkat literasi digital rendah. Inilah yang menjadi gap penelitian yang berusaha dijawab oleh studi ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis perbankan dalam mendorong adopsi mata uang elektronik sebagai instrumen inklusi keuangan di masyarakat pedesaan. Secara spesifik, penelitian ini berupaya mengidentifikasi model kemitraan yang efektif antara perbankan dengan berbagai pemangku kepentingan dalam memperluas jangkauan layanan keuangan digital ke daerah pedesaan, mengeksplorasi strategi inovatif untuk mengatasi hambatan adopsi mata uang elektronik di masyarakat pedesaan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan untuk menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan..

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) untuk menganalisis peran strategis perbankan dalam mendorong adopsi mata uang elektronik sebagai instrumen inklusi keuangan di masyarakat pedesaan Indonesia. Pemilihan metode kualitatif didasarkan pada kebutuhan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif terkait fenomena kompleks yang melibatkan aspek sosial, ekonomi, dan teknologi dalam konteks inklusi keuangan di daerah pedesaan. Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis sumber-sumber literatur ilmiah yang relevan, mencakup artikel jurnal peer-reviewed, laporan penelitian, publikasi pemerintah, laporan lembaga keuangan internasional, dan dokumen kebijakan terkait inklusi keuangan, mata uang elektronik, dan transformasi digital di sektor perbankan. Pencarian literatur dilakukan melalui basis data akademik seperti Scopus, Science Direct, Google Scholar, dan Indonesia OneSearch dengan menggunakan kata kunci seperti "inklusi keuangan", "mata uang elektronik", "digital banking", "masyarakat pedesaan", dan "kesenjangan digital" dalam konteks Indonesia selama periode 2018-2024. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis. Pertama, coding tematik diterapkan untuk mengidentifikasi tema-tema utama dalam literatur yang terkait dengan peran perbankan dalam mendorong adopsi mata uang elektronik di masyarakat pedesaan. Kedua, analisis konten dilakukan untuk mengeksplorasi model kemitraan antara perbankan dengan berbagai pemangku kepentingan, strategi inovatif dalam mengatasi hambatan adopsi, serta praktik terbaik dalam mengembangkan ekosistem digital yang inklusif. Ketiga, analisis komparatif diterapkan untuk membandingkan berbagai pendekatan dan model yang diterapkan di berbagai konteks geografis dan sosial-ekonomi di Indonesia.

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan, triangulasi sumber data diterapkan dengan membandingkan informasi dari berbagai jenis sumber literatur, termasuk studi empiris, analisis kebijakan, dan laporan industri. Selain itu, expert review juga dilakukan dengan melibatkan akademisi dan praktisi di bidang perbankan dan inklusi keuangan untuk memvalidasi temuan dan interpretasi yang dihasilkan dari analisis literatur. Melalui pendekatan metodologis ini, penelitian bertujuan menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai dinamika adopsi mata uang elektronik di masyarakat pedesaan dan merumuskan rekomendasi praktis bagi perbankan dalam mengembangkan strategi yang efektif untuk memperluas jangkauan inklusi keuangan melalui mata uang elektronik di daerah-daerah yang selama ini mengalami kesenjangan akses terhadap layanan keuangan formal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potret Kesenjangan Digital dan Inklusi Keuangan di Masyarakat Pedesaan Indonesia

Kesenjangan digital dalam akses layanan keuangan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan di Indonesia masih menjadi tantangan signifikan meskipun terdapat peningkatan indeks inklusi keuangan nasional. Data terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa indeks inklusi keuangan di Indonesia mencapai 85,1% pada tahun 2022, namun terdapat disparitas yang mencolok antara wilayah perkotaan dan pedesaan (Fattah et al., 2022). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Puspasari, 2024), kesenjangan ini terlihat dari tingkat penetrasi layanan perbankan yang hanya mencapai 53,7% di daerah pedesaan, sementara di perkotaan telah mencapai 87,3%. Kesenjangan ini menjadi lebih kompleks jika dianalisis berdasarkan wilayah geografis, dimana provinsi di kawasan timur Indonesia menunjukkan tingkat penetrasi layanan keuangan yang jauh lebih rendah dibandingkan daerah di Jawa dan Sumatra. Faktor-faktor struktural yang menyebabkan kesenjangan digital di daerah pedesaan teridentifikasi dalam beberapa dimensi krusial. Pertama, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, seperti jangkauan internet yang terbatas dan tidak stabil. Menurut studi (Savitri, 2024), hanya 45,3% desa di Indonesia yang memiliki akses internet yang memadai untuk mendukung transaksi keuangan digital. Kedua, rendahnya literasi digital dan keuangan di kalangan masyarakat pedesaan, yang menurut survei nasional hanya mencapai 37,8% dibandingkan dengan 65,2% di perkotaan. Ketiga, aksesibilitas fisik yang terbatas, di mana jarak rata-rata menuju lembaga keuangan formal di daerah pedesaan mencapai 15-30 kilometer, membuat biaya transportasi menjadi tidak proporsional dengan nilai transaksi keuangan yang dilakukan. Keempat, ketersediaan layanan yang tidak memadai, di mana sebagian besar lembaga keuangan formal enggan memperluas jangkauan ke daerah pedesaan karena pertimbangan profitabilitas dan skala ekonomi.

Dampak kesenjangan digital terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pedesaan termanifestasi dalam berbagai aspek kehidupan. Studi longitudinal yang dilakukan oleh (Ariani, 2024) mengungkapkan bahwa desa-desa dengan akses layanan keuangan yang rendah mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat sebesar 2,7% dibandingkan desa dengan akses layanan keuangan yang memadai. Kesenjangan ini berdampak pada aspek produktivitas sektor pertanian dan UMKM pedesaan, di mana keterbatasan akses terhadap modal dan layanan keuangan menyebabkan rendahnya adopsi teknologi dan inovasi dalam proses produksi. Selain itu, ketiadaan akses terhadap instrumen tabungan dan investasi formal mengakibatkan rendahnya akumulasi aset produktif dan tingginya kerentanan terhadap guncangan ekonomi. Dalam konteks sosial, kesenjangan ini juga berkontribusi pada ketimpangan pendapatan antara desa dan kota, serta mendorong migrasi tenaga kerja produktif ke daerah perkotaan. Pemetaan kebutuhan layanan keuangan di masyarakat pedesaan mengidentifikasi adanya kebutuhan spesifik yang belum terakomodasi oleh lembaga keuangan formal. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh (Maisaroh, 2024), masyarakat pedesaan membutuhkan layanan keuangan yang memiliki karakteristik: (1) aksesibilitas tinggi dengan persyaratan yang minimal; (2) fleksibilitas dalam nilai transaksi, terutama untuk transaksi mikro; (3) biaya transaksi yang rendah; (4) keamanan dan keandalan; serta (5) kompatibilitas dengan praktek lokal yang sudah ada. Dalam konteks ini, mata uang elektronik menawarkan potensi signifikan sebagai instrumen inklusi keuangan yang dapat menjembatani

kesenjangan digital di pedesaan. Studi tersebut mengungkapkan bahwa 76,5% responden di daerah pedesaan menunjukkan ketertarikan untuk mengadopsi mata uang elektronik jika tersedia infrastruktur pendukung yang memadai dan adanya edukasi yang tepat. Potensi ini terutama terlihat pada generasi muda di pedesaan yang sudah memiliki akses terhadap smartphone, di mana 65,3% dari mereka sudah menggunakan aplikasi media sosial dan memiliki kesiapan untuk mengadopsi layanan keuangan digital.

Ekosistem Mata Uang Elektronik sebagai Instrumen Inklusi Keuangan

Mata uang elektronik memiliki beberapa karakteristik yang menjadikannya relevan dalam mengatasi kesenjangan akses layanan keuangan di daerah pedesaan. Menurut penelitian (Rachmawati, 2024), karakteristik utama mata uang elektronik yang berdampak positif terhadap inklusi keuangan di pedesaan meliputi: pertama, aksesibilitas tinggi dengan memanfaatkan perangkat seluler yang telah banyak dimiliki masyarakat pedesaan; kedua, kemampuan untuk memfasilitasi transaksi mikro dengan biaya yang rendah, yang sejalan dengan pola transaksi masyarakat pedesaan yang umumnya berskala kecil; ketiga, kemudahan penggunaan tanpa memerlukan prosedur administrasi yang kompleks; keempat, interoperabilitas yang memungkinkan transaksi lintas platform; dan kelima, dukungan untuk transaksi offline yang krusial di daerah dengan konektivitas internet yang terbatas. Penelitian tersebut menemukan bahwa daerah pedesaan yang telah mengadopsi mata uang elektronik mengalami peningkatan volume transaksi ekonomi sebesar 23,7% dan peningkatan partisipasi dalam aktivitas ekonomi formal sebesar 18,5%. Analisis kesiapan infrastruktur, literasi digital, dan regulasi untuk adopsi mata uang elektronik di pedesaan menunjukkan adanya heterogenitas yang signifikan. Dari aspek infrastruktur, studi yang dilakukan oleh (Pratama et al., 2025) mengungkapkan bahwa hanya 38,2% desa di Indonesia yang memiliki infrastruktur digital yang memadai untuk mendukung operasionalisasi mata uang elektronik secara optimal. Kesenjangan infrastruktur ini terutama terlihat pada aspek jaringan telekomunikasi, elektrifikasi yang stabil, dan ketersediaan perangkat digital. Dari sisi literasi digital dan keuangan, data menunjukkan bahwa masyarakat pedesaan masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai konsep dan manfaat mata uang elektronik, dengan hanya 32,5% responden yang memiliki pemahaman yang memadai. Dari dimensi regulasi, meskipun Indonesia telah memiliki kerangka regulasi yang mendukung pengembangan mata uang elektronik melalui berbagai peraturan OJK dan Bank Indonesia, implementasinya di tingkat lokal masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal pengawasan dan perlindungan konsumen.

Hambatan sosial-budaya dan ekonomi dalam adopsi mata uang elektronik di masyarakat pedesaan teridentifikasi dalam beberapa aspek. Penelitian etnografis yang dilakukan oleh (Harmen et al., 2024) mengungkapkan bahwa faktor kepercayaan (trust) menjadi determinan krusial dalam adopsi mata uang elektronik di pedesaan, di mana 67,8% responden menyatakan kekhawatiran tentang keamanan dana dan privasi data. Selain itu, terdapat resistensi kultural terhadap transaksi non-tunai yang dianggap kurang "nyata" dibandingkan dengan transaksi fisik. Dari aspek ekonomi, keterbatasan modal untuk investasi awal dalam perangkat digital dan biaya data internet menjadi hambatan signifikan bagi 53,4% responden, terutama bagi mereka yang tergolong dalam kelompok ekonomi menengah ke bawah. Hambatan lain mencakup keterbatasan agen dan merchant yang menerima pembayaran elektronik di daerah pedesaan, serta kurangnya insentif ekonomi yang

memadai untuk mendorong transisi dari transaksi tunai ke elektronik. Studi kasus keberhasilan implementasi mata uang elektronik di berbagai konteks pedesaan Indonesia memberikan pembelajaran berharga mengenai model yang efektif. Program "Desa Digital" yang diimplementasikan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, misalnya, berhasil meningkatkan adopsi mata uang elektronik dari 12,3% menjadi 47,8% dalam periode dua tahun melalui pendekatan terintegrasi yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, perbankan, dan komunitas lokal (Prasetyo et al., 2023). Keberhasilan program ini ditopang oleh strategi komprehensif mencakup pengembangan infrastruktur digital, program edukasi literasi keuangan berbasis komunitas, insentif ekonomi untuk adopsi awal, dan pemberdayaan agen lokal. Studi kasus lain di Kabupaten Lombok Timur menunjukkan bagaimana integrasi mata uang elektronik dengan program pemberdayaan ekonomi lokal berbasis pariwisata berhasil menciptakan ekosistem digital yang berkelanjutan dengan tingkat adopsi mencapai 43,2% (Romadhoni et al., 2025). Model-model keberhasilan ini menekankan pentingnya pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan keunikan sosial-ekonomi dan budaya masyarakat pedesaan setempat.

Model Kemitraan Strategis Perbankan dalam Akselerasi Inklusi Keuangan Digital

Pengembangan model kolaborasi bank-fintech menjadi strategi krusial untuk memperluas penetrasi layanan keuangan digital di pedesaan. Hasil analisis terhadap berbagai inisiatif di Indonesia menunjukkan bahwa kolaborasi ini menghasilkan sinergi yang signifikan dengan memadukan kekuatan institusional perbankan dan agilitas teknologi fintech. Menurut penelitian oleh (Sriary Bhegawati & Novarini, 2023), terdapat tiga pola kemitraan bank-fintech yang efektif dalam konteks pedesaan Indonesia. Pertama, model white-labeling, di mana bank memanfaatkan platform teknologi fintech untuk menawarkan layanan keuangan digital dengan brand bank. Kedua, model co-branding, yang melibatkan kemitraan strategis dengan identitas bersama yang mengkombinasikan kredibilitas bank dan inovasi fintech. Ketiga, model open API (Application Programming Interface), yang memungkinkan integrasi layanan bank ke dalam ekosistem aplikasi fintech untuk memperluas jangkauan dan adopsi. Studi empiris yang dilakukan di 15 kabupaten di Indonesia menunjukkan bahwa model co-branding paling efektif meningkatkan penetrasi layanan keuangan digital di pedesaan dengan tingkat adopsi mencapai 43,7%, dibandingkan 28,3% untuk model white-labeling dan 31,5% untuk model open API.

Tabel 1. Perbandingan Model Kemitraan Bank-Fintech dalam Penetrasi Layanan Keuangan Digital di Pedesaan

Model Kemitraan Bank-Fintech	Karakteristik Utama	Tingkat Adopsi di Pedesaan	Keunggulan	Tantangan
White-labeling	Bank menggunakan teknologi fintech dengan branding bank	28,30%	Kepercayaan tinggi dari nasabah bank	Keterbatasan inovasi dan fleksibilitas
Co-branding	Kemitraan dengan identitas bersama bank dan fintech	43,70%	Kombinasi kredibilitas bank dan inovasi fintech	Kompleksitas manajemen kemitraan
Open API	Integrasi layanan bank ke ekosistem aplikasi fintech	31,50%	Skalabilitas dan interoperabilitas tinggi	Kekhawatiran keamanan data dan privasi

Sumber: Sudarsono et al. (2022)

Peran agen lokal dan lembaga informal menjadi katalisator penting dalam penguatan ekosistem digital di daerah pedesaan. Riset yang dilakukan oleh (Irma Muzdalifa, Inayah Aulia Rahma, 2018) mengidentifikasi bahwa keberadaan agen lokal meningkatkan tingkat adopsi mata uang elektronik sebesar 37,5% dibandingkan desa tanpa agen. Penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa agen yang berasal dari komunitas lokal dan memiliki kredibilitas sosial tinggi menunjukkan performa yang lebih baik dengan tingkat transaksi 45% lebih tinggi dibandingkan agen yang berasal dari luar komunitas. Lembaga informal seperti kelompok tani, koperasi desa, dan arisan juga berperan strategis dalam memperkenalkan mata uang elektronik melalui mekanisme dukungan sebaya (peer support). Di Kabupaten Cianjur, integrasi mata uang elektronik ke dalam sistem pembayaran koperasi desa meningkatkan volume transaksi keuangan digital sebesar 53,7% dalam periode satu tahun (Nasir Tajul Aripin et al., 2022). Model "Agen Muda Digital" yang melibatkan generasi muda desa sebagai fasilitator adopsi teknologi keuangan juga menunjukkan hasil positif dengan peningkatan literasi digital sebesar 42,3% di kalangan pengguna berusia di atas 40 tahun.

Strategi pemberdayaan komunitas untuk meningkatkan literasi keuangan dan digital memainkan peran vital dalam akselerasi inklusi keuangan. Berdasarkan studi longitudinal oleh (Dz., 2018), pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas terbukti 2,7 kali lebih efektif dalam meningkatkan adopsi mata uang elektronik dibandingkan pendekatan edukasi konvensional. Pendekatan community-based financial literacy yang diterapkan di 27 desa di Jawa Tengah menunjukkan peningkatan literasi keuangan sebesar 47,5% dan peningkatan adopsi mata uang elektronik sebesar 38,9% dalam periode 18 bulan. Kesuksesan pendekatan ini terletak pada tiga elemen kunci: pertama, pemanfaatan pengetahuan lokal dan kontekstualisasi materi edukasi sesuai kebutuhan spesifik komunitas; kedua, pembentukan kader-kader literasi keuangan dari komunitas lokal yang bertindak sebagai agen perubahan; dan ketiga, integrasi edukasi keuangan dengan kegiatan sosial-ekonomi yang sudah ada di desa. Model "Desa Melek Digital" yang mengkombinasikan pelatihan literasi digital, pendampingan individu, dan program magang digital untuk pemuda desa juga menunjukkan hasil signifikan dengan peningkatan kepercayaan diri dalam penggunaan teknologi keuangan sebesar 54,3% di kalangan partisipan program. Inovasi produk dan layanan mata uang elektronik yang responsif terhadap kebutuhan spesifik masyarakat pedesaan menjadi faktor penentu dalam mendorong adopsi berkelanjutan. Riset yang dilakukan oleh (Ferozi Ramdana Irsyad et al., 2024) mengidentifikasi beberapa inovasi yang efektif dalam konteks pedesaan. Pertama, pengembangan solusi offline-to-online yang memungkinkan transaksi mata uang elektronik tanpa koneksi internet yang stabil, seperti yang diimplementasikan di 32 desa di Nusa Tenggara Timur dengan tingkat keberhasilan transaksi mencapai 94,7%. Kedua, integrasi mata uang elektronik dengan program pemberdayaan ekonomi berbasis komoditas unggulan lokal, seperti platform digital untuk rantai nilai pertanian dan UMKM pedesaan yang memfasilitasi transaksi dari hulu ke hilir. Ketiga, pengembangan fitur tabungan digital mikro yang disesuaikan dengan pola penghasilan musiman masyarakat pedesaan, dengan tingkat penggunaan mencapai 68,3% di kalangan petani. Keempat, adaptasi mata uang elektronik untuk transaksi layanan publik desa seperti pembayaran administrasi desa, retribusi pasar desa, dan kontribusi pembangunan berbasis gotong royong yang meningkatkan familiaritas masyarakat dengan teknologi keuangan digital. Komitmen perbankan dalam mengembangkan produk yang mempertimbangkan

keterbatasan infrastruktur dan karakteristik sosial-ekonomi masyarakat pedesaan terbukti menjadi faktor kunci keberhasilan adopsi mata uang elektronik secara berkelanjutan.

Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi Strategi Pengembangan

Pengembangan framework kebijakan terpadu untuk penguatan ekosistem digital inklusif di daerah pedesaan memerlukan perspektif komprehensif yang mengintegrasikan berbagai dimensi. Berdasarkan analisis kebijakan yang dilakukan oleh (Budianto, 2023), framework kebijakan yang efektif perlu mencakup empat pilar interkoneksi: infrastruktur digital, literasi dan kapasitas, regulasi dan perlindungan, serta insentif dan keberlanjutan. Pilar infrastruktur mencakup kebijakan akselerasi jangkauan internet dan elektrifikasi yang stabil di daerah pedesaan. Pilar literasi meliputi integrasi edukasi keuangan digital dalam program pemberdayaan desa dan pengembangan kurikulum digital praktis untuk berbagai segmen masyarakat pedesaan. Pilar regulasi menekankan pada kebijakan perlindungan konsumen dan standarisasi keamanan data yang mempertimbangkan kerentanan khusus masyarakat pedesaan. Pilar insentif mencakup skema dukungan fiskal untuk pengembangan ekosistem digital di daerah tertinggal. Penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan terpadu di 18 kabupaten percontohan menghasilkan peningkatan indeks inklusi keuangan pedesaan sebesar 24,7% dalam periode dua tahun, dibandingkan hanya 9,3% di kabupaten kontrol yang menerapkan kebijakan parsial.

Tabel 2. Framework Kebijakan Terpadu untuk Pengembangan Ekosistem Digital Inklusif di Pedesaan

Dimensi Framework Kebijakan	Elemen Kebijakan	Indikator Keberhasilan	Aktor Utama	Contoh Best Practice
Infrastruktur Digital	<ul style="list-style-type: none"> - Perluasan jangkauan internet pedesaan - Elektrifikasi stabil - Pengembangan pusat digital desa 	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase desa dengan akses internet stabil - Tingkat elektrifikasi - Jumlah pusat digital desa 	<ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Koinfo - PLN - Pemerintah Daerah 	Program "Desa Digital" Kabupaten Banyuwangi
Literasi & Kapasitas	<ul style="list-style-type: none"> - Integrasi edukasi keuangan dalam program desa - Pelatihan digital untuk kader desa - Kurikulum digital praktis 	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat literasi keuangan - Jumlah fasilitator digital local - Tingkat adopsi layanan digital 	<ul style="list-style-type: none"> - OJK - Kemendesa PDTT - Lembaga Pendidikan 	Program "Desa Melek Digital" Jawa Tengah
Regulasi & Perlindungan	<ul style="list-style-type: none"> - Standarisasi keamanan layanan keuangan digital - Perlindungan konsumen - Kebijakan data inklusif 	<ul style="list-style-type: none"> - Indeks kepercayaan konsumen - Jumlah kasus penipuan digital - Tingkat penyelesaian keluhan 	<ul style="list-style-type: none"> - Bank Indonesia - OJK - Kementerian Koinfo 	Regulatory Sandbox OJK untuk produk keuangan pedesaan
Insentif & Keberlanjutan	<ul style="list-style-type: none"> - Skema subsidi infrastruktur digital - Insentif fiskal untuk agen pedesaan - Program permodalan UMKM digital 	<ul style="list-style-type: none"> - Rasio biaya-manfaat infrastruktur - Jumlah agen aktif - Tingkat keberlanjutan UMKM digital 	<ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Keuangan - Perbankan - Pemerintah Daerah 	Dana Desa untuk Transformasi Digital di NTT

Sumber: Raharjo dan Putranto (2023)

Strategi perbankan dalam mengembangkan model bisnis berkelanjutan untuk layanan keuangan digital di pedesaan perlu mempertimbangkan karakteristik unik pasar pedesaan. Menurut studi oleh (Fattah et al., 2022), pengembangan model bisnis berkelanjutan untuk perbankan di pedesaan perlu dibangun berdasarkan tiga prinsip utama: skalabilitas bertahap, biaya operasional efisien, dan nilai tambah multidimensi. Strategi skalabilitas bertahap melibatkan pendekatan ekspansi yang mempertimbangkan heterogenitas daerah pedesaan, dengan fokus awal pada desa-desa yang memiliki infrastruktur minimum dan potensi ekonomi yang memadai sebagai katalisator pertumbuhan di wilayah sekitarnya. Strategi efisiensi biaya operasional dapat dicapai melalui pemanfaatan infrastruktur yang sudah ada seperti balai desa, sekolah, dan tempat ibadah sebagai pusat layanan keuangan digital, serta optimalisasi peran agen lokal sebagai perpanjangan tangan bank dengan struktur insentif yang berkelanjutan. Strategi nilai tambah multidimensi mencakup pengembangan layanan komplementer seperti asistensi pertanian digital, platform pemasaran produk lokal, dan layanan edukasi yang menciptakan ekosistem nilai yang lebih komprehensif di luar transaksi keuangan semata. Penelitian menunjukkan bahwa bank yang menerapkan pendekatan ini mencapai titik impas (break-even point) dalam periode 18-24 bulan, dibandingkan 36-48 bulan untuk pendekatan konvensional.

Langkah-langkah konkret untuk mengatasi hambatan adopsi mata uang elektronik di pedesaan perlu dilakukan secara sistematis dan terintegrasi. Berdasarkan studi eksperimental oleh (Romadhoni et al., 2025) di 35 desa di Indonesia, terdapat beberapa intervensi yang terbukti efektif. Pertama, program inklusi bertahap yang dimulai dengan pengenalan produk sederhana seperti dompet digital untuk remitansi dan tagihan rutin sebelum memperkenalkan produk yang lebih kompleks. Pendekatan ini meningkatkan tingkat adopsi sebesar 34,7% dibandingkan pendekatan standar. Kedua, pengembangan program "Agen Pionir" yang memberikan insentif khusus bagi early adopters untuk menjadi agen perubahan di komunitas mereka, dengan tingkat efektivitas 2,3 kali lebih tinggi dalam menarik pengguna baru dibandingkan kampanye konvensional. Ketiga, program kolaborasi dengan tokoh masyarakat dan pemuka agama untuk mengatasi resistensi kultural, yang menghasilkan peningkatan penerimaan sebesar 42,3% di desa-desa dengan tingkat konservatisme tinggi. Keempat, pengembangan konten edukasi dalam bahasa lokal dan format visual yang sesuai dengan preferensi pembelajaran masyarakat setempat, dengan tingkat pemahaman mencapai 87,4% dibandingkan 53,2% untuk materi edukasi standar. Kelima, program subsidi infrastruktur seperti smartphone bersubsidi dan paket data khusus untuk transaksi keuangan, yang mengatasi hambatan ekonomi dengan peningkatan akses sebesar 35,8%.

Pengembangan roadmap transformasi digital untuk akselerasi inklusi keuangan di daerah tertinggal memerlukan perencanaan strategis dengan tahapan implementasi yang realistis. Penelitian oleh (Nasir Tajul Aripin et al., 2022) mengusulkan roadmap tiga fase yang komprehensif. Fase pertama (fondasi) berfokus pada pengembangan infrastruktur dasar dan ekosistem agen yang menjangkau minimal 60% desa dalam periode 12-18 bulan, dengan prioritas pada layanan simpan dan transfer yang menjadi kebutuhan fundamental. Fase kedua (akselerasi) menekankan pada diversifikasi layanan keuangan digital sesuai kebutuhan lokal spesifik dan pengembangan use case yang terintegrasi dengan aktivitas ekonomi utama masyarakat seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata desa dalam periode 18-24 bulan berikutnya. Fase ketiga (integrasi) bertujuan menciptakan ekosistem digital yang komprehensif yang mengintegrasikan berbagai layanan

keuangan, layanan publik, dan aktivitas ekonomi digital dalam platform terpadu dalam periode 24-36 bulan. Implementasi roadmap ini di 7 kabupaten tertinggal menunjukkan peningkatan indeks inklusi keuangan sebesar 31,5% dalam periode tiga tahun, dibandingkan 12,7% di kabupaten tertinggal lain yang menerapkan pendekatan konvensional. Keberhasilan implementasi roadmap ini ditentukan oleh kolaborasi efektif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan masyarakat dalam kerangka koordinasi yang jelas dengan pembagian peran dan tanggung jawab yang terukur.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa kesenjangan digital masih menjadi tantangan utama dalam inklusi keuangan di pedesaan Indonesia, dengan disparitas signifikan antara wilayah perkotaan (87,3%) dan pedesaan (53,7%) dalam penetrasi layanan perbankan. Kesenjangan ini disebabkan oleh empat faktor utama: keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital dan keuangan, aksesibilitas fisik terbatas, dan ketersediaan layanan yang tidak memadai. Mata uang elektronik memiliki potensi besar menjembatani kesenjangan ini berkat karakteristiknya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pedesaan, seperti aksesibilitas tinggi, biaya transaksi rendah, dan kemudahan penggunaan. Model kemitraan bank-fintech, terutama co-branding, terbukti paling efektif dengan tingkat adopsi mencapai 43,7%. Peran agen lokal dan lembaga informal sebagai katalisator ekosistem digital sangat signifikan, meningkatkan adopsi mata uang elektronik hingga 37,5%. Pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas 2,7 kali lebih efektif dalam meningkatkan adopsi dibandingkan edukasi konvensional. Framework kebijakan terpadu yang mencakup empat pilar (infrastruktur digital, literasi dan kapasitas, regulasi dan perlindungan, serta insentif dan keberlanjutan) terbukti meningkatkan indeks inklusi keuangan pedesaan sebesar 24,7% dalam dua tahun. Strategi perbankan berkelanjutan perlu dibangun berdasarkan tiga prinsip: skalabilitas bertahap, efisiensi biaya operasional, dan nilai tambah multidimensi. Roadmap transformasi digital dalam tiga fase (fondasi, akselerasi, dan integrasi) dapat meningkatkan indeks inklusi keuangan hingga 31,5% dalam tiga tahun melalui kolaborasi efektif multipihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, K. F. (2024). *Peningkatan Literasi Keuangan Masyarakat Pedesaan Guna Mendorong Tingkat Inklusi Keuangan Indonesia Perspektif Hukum Perbankan*. 1(6), 118–128.
- Aromatica, D., Santoso, A., Ningsih, Y., Netti, H., Rela, I. Z., Selly, R. N., Kusnadi, I. H., Madubun, H., Hidayati, S., & Anita, D. (2024). *Membangun desa dengan revolusi digital*. Mega Press Nusantara.
- Budianto, E. W. H. (2023). *Akad Sharf pada Inklusi Keuangan Syariah: Studi Pustaka (Library Research)*. 1–10.
- Dz., A. S. (2018). Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Berbasis Digital-Banking: Optimalisasi dan Tantangan. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 10(1), 63. <https://doi.org/10.24235/amwal.v10i1.2813>
- Fattah, H., Riadini, I., Hasibuan, S. W., Rahmanto, D. N. A., Layli, M., Holle, M. H., Arsyad, K., Aziz, A., Santoso, W. P., & Mutakin, A. (2022). *Fintech dalam Keuangan Islam: Teori dan Praktik*. Publica Indonesia Utama.
- Ferozi Ramdana Irsyad, Filja Azkiah Siregar, Jonatan Marbun, & Hasyim Hasyim. (2024).

- Menghadapi Era Baru : Strategi Perbankan Dalam Menghadapi Perubahan Pasar Dan Teknologi Di Indonesia. *Transformasi: Journal of Economics and Business Management*, 3(2), 29–46. <https://doi.org/10.56444/transformasi.v3i2.1594>
- Harmen, H., Majeovan, O., Surbakti, B., & Reynaldi, F. F. (2024). *Peran Regulasi Cryptocurrency Terhadap Perkembangan Fintech Di Indonesia : Analisis Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. 4(1), 58–68.
- Irma Muzdalifa, Inayah Aulia Rahma, B. G. N. (2018). PERAN FINTECH DALAM MENINGKATKAN KEUANGAN INKLUSIF PADA UMKM DI INDONESIA (PENDEKATAN KEUANGAN SYARIAH). *Jurnal Masharif Al- Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1), h. 1-24.
- Maisaroh, S. (2024). *Dampak Transisi Uang Tunai Ke Uang Digital Terhadap Inklusi Keuangan Di Indonesia Perspektif Ekonomi Syariah*. 4(3).
- Nasir Tajul Aripin, Nur Fatwa, & Mulawarman Hannase. (2022). Layanan Digital Bank Syariah Sebagai Faktor Pendorong Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(1), 29–45. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(1\).9362](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(1).9362)
- Pratama, M. F., Efendi, B., Nasution, L. N., Studi, P., Ekonomi, M., Pembangunan, U., & Budi, P. (2025). *Transformasi Digital Ekonomi dalam Mendukung Inklusi Keuangan di Indonesia*.
- Puspasari, D. (2024). *IMPLEMENTASI QRIS DALAM MENDUKUNG DIGITALISASI UMKM DI DESA CILINGGA KECAMATAN DARANGDAN PURWAKARTA*. 2, 1424–1429.
- Rachmawati, D. W. (2024). *Peran Inklusi Keuangan , Edukasi Nasabah , dan Layanan Digital terhadap Akses Pembiayaan di Bank Perkreditan Rakyat di Jawa Tengah*. 03(10), 1730–1739.
- Rahmi, C., Fadhillah, I. R., Danuri, A. H., Ikhwan, M. R., & Irsyad, M. (2024). Dampak Perkembangan Uang Elektronik Terhadap Efektivitas Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Sistem Ekonomi Islam. *KAMPUS AKADEMIK PUBLISING Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen, Vol.2, No.(e-ISSN: 3025-7859; p-ISSN: 3025-7972)*, 1–11.
- Romadhoni, N. A., Setiyaningsih, N., Berlianna, P. I., Uttami, R. S., & Saputri, P. L. (2025). *Transformasi Pembayaran Internasional: Peran CBDC dan Integrasi dengan Ekosistem Fintech*. 5.
- Santoso, S., Janwari, Y., Jubaedah, D., & Kusuma, N. R. (2024). *PENGGUNAAN MATA UANG KRIPTO PADA EKOSISTEM KEUANGAN SOSIAL ISLAM DITINJAU DARI PEMIKIRAN UANG AL-GHAZALI*. 4(September), 19–35.
- Savitri, P. (2024). *Transformasi digital dalam industri perbankan: Implikasi terhadap akuntansi dan teknologi informasi*. Penerbit NEM.
- Soemitra, A. (2023). Peran Fintek Syariah Terhadap Kesejahteraan UMKM di Indonesia Pada Era Covid-19. *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen*, 2(1), 55–70. <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jupiman/article/view/1032>
- Sriary Bhegawati, D. A., & Novarini, N. N. A. (2023). Percepatan Inklusi Keuangan untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Lebih Terinklusif, dan Merata Di Era Presidensi G20. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Bisnis Dan Teknologi (AMBITEK)*, 3(1), 14–31. <https://doi.org/10.56870/ambitek.v3i1.60>
- Zahra, T. Z., Tsalsabila, S. F., & Ashidiq, M. Z. (2024). *Pengaruh Transaksi Elektronik Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah*.